BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab pada penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fazlur Rahman menetapkan zakat sebagai pajak, dengan alasan bahwa zakat sesungguhnya adalah ajaran umum al-Qur'an tentang keadilan sosio-ekonomi. Zakat pada masa Nabi sudah menjadi sumber penerimaan negara. Nabi kemudian menetapkan tarifnya yang diselaraskan dengan kebutuhan normal masyarakatnya. Sementara kebutuhan masyarakat modern dewasa ini telah berkembang sangat luas. Dengan pertimbangan semacam ini, Fazlur Rahman menyarankan perlunya penyesuaian tarif zakat dengan kebutuhan-kebutuhan modern serta aplikasinya sebagai pengganti pajak-pajak sekular di negara-negara Islam. Fazlur Rahman mencetuskan pemikiran mengenai zakat sebagai pajak dimaksudkan agar peran zakat di Pakistan itu maksimal dan posisi zakat tidak tergeser dan tidak diambil alih oleh pajak sekuler pada sebuah negara modern. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman umat Islam perlu memperbaiki lembaga zakat sebagai sistem pajak. Menurut penulis, penetapan zakat sebagai pajak juga harus diimbangi dengan regulasi mengenai penetapan sanksi yang tegas bagi para *muzakki* yang tidak membayar zakat oleh pemerintah Indonesia, hal ini dilakukan agar zakat dapat berjalan secara

maksimal dengan adanya sanksi yang tegas bagi muzakki yang mengelak membayar zakat.

2. Metode pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapan zakat sebagai pajak yaitu “*double movement of interpretation*”. Metode pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapan zakat sebagai pajak dapat dilihat dari aspek maqasid syari’ah yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan cara penafsiran kembali terhadap kategori delapan *ashnaf* oleh Fazlur Rahman yang mencakup seluruh aspek pembiayaan negara, meliputi biaya pertahanan, pendidikan, komunikasi dan bahkan biaya pendelegasian diplomatik. Metode pemikiran Fazlur Rahman juga dapat dilihat dari aspek pengembangan *illat* hukum yaitu agar tercipta kesejahteraan sosial, ekonomi, politik dan keuangan, dengan cara distribusi kekayaan sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, hal ini sesuai dengan tujuan zakat yang terdapat QS. al-Hasyr: 7 yang menetapkan prinsip bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Fazlur Rahman menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk umum yang salah satu realisasi hukumnya adalah perlunya institusi zakat. Menurut Fazlur Rahman, zakat harus mencakup seluruh aktivitas dan kebutuhan dana sebuah negara modern.

B. Saran-saran

1. Upaya untuk memperbaiki hukum Islam agar tetap relevan dengan sosio-kultural perlu terus digiatkan. Sebab, dengan terus mencari format ideal melalui ijtihad inilah hukum Islam akan tetap relevan.

2. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode yang tepat akan semakin menguatkan kajian akademik hukum Islam. Sehingga akan selalu muncul metode-metode baru yang relevan untuk mengkaji hukum Islam.
3. Untuk menghasilkan produk pemikiran yang *applicable* perlu dipertimbangkan implikasi dan relevansinya. Sebab, sedalam dan sekuat apapun dalil yang digunakan (teks formal) tanpa mempertimbangkan realitas, pemikiran tersebut akan kandas pada wilayah konsep semata. Di sinilah diperlukan kajian sosio-historis agar sebuah pemikiran dapat diterapkan sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.